

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 18 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dipandang perlu untuk mengatur Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Kotabaru;
- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PermenPU No. 21/PRT/M/2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; ; Perda Kabupaten Kotabaru No. 2 Tahun 2002; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 11 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Sampah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Ruang lingkup;
 3. Asas dan tujuan;
 4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 5. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 6. Lembaga pengelola;
 7. Hak, kewajiban masyarakat dan pelaku usaha;
 8. Perizinan;
 9. Insentif dan disinsentif;
 10. Kerja sama dan kemitraan;
 11. Retribusi pelayanan persampahan;
 12. Pembiayaan dan kompensasi;
 13. Peran masyarakat;;
 14. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 15. Pengawasan dan pembinaan;
 16. Pelaporan;
 17. Larangan;
 18. Penyidikan;
 19. Sanksi Administrasi;
 20. Ketentuan Pidana;
 21. Ketentuan Peralihan;

22. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : ---